

# **Pembangunan Kota Pesisir Versus Keberlanjutan Sumberdaya Pesisir dan Laut (Studi kasus Pengembangan Kota Jayapura Papua)**

Selvi Tebaiy

Jurusan Perikanan Universitas Negeri Papua, Manokwari

Email: [selvitebay@ymail.com](mailto:selvitebay@ymail.com)

## **Abstrak**

Kawasan pesisir mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai prioritas pembangunan sehingga secara langsung maupun tidak langsung pembangunan dan pengembangan di kawasan ini akan mempengaruhi ekosistem dan sumberdaya alamnya. Di Indonesia pada saat ini terdapat 319 Kabupaten/kota yang berada di wilayah pesisir, kabupaten/kota tersebut mempunyai peranan yang strategis selain menjadi pusat konsentrasi penduduk, juga menjadi pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi. Kota Jayapura merupakan kota pesisir yang terletak di pesisir Teluk Yosudarso dan Teluk Youtefa, memiliki sumberdaya pesisir seperti mangrove, lamun, terumbu karang, sumberdaya ikan, kerang-kerangan dan biota lain yang berasosiasi didalamnya. Tekanan terhadap sumberdaya terus terjadi yang disebabkan oleh perubahan peruntukan lahan daratan yang digunakan untuk pengembangan Kota Jayapura. Pembangunan terpadu (*integrated coastal management*) dengan mengintegrasikan hukum adat dalam konsep pengelolaan kawasan pesisir Kota Jayapura, menjadi solusi terbaik dalam mengurangi tekanan terhadap sumberdaya pesisir dan laut.

## **Pendahuluan**

Pada saat ini terdapat 319 kabupaten/kota yang berada di wilayah pesisir, kabupaten/kota tersebut mempunyai peranan yang strategis selain menjadi pusat konsentrasi penduduk, juga menjadi pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi. Terjadinya pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi yang prospektif di kabupaten/kota pesisir, seperti: kegiatan perikanan, industri maritim, pariwisata bahari, perhubungan, jasa-jasa perdagangan, serta pemukiman. Menjadikan hampir sebagian besar ibukota Provinsi, kabupaten/kota berada di wilayah pesisir. Dengan demikian, maka kota-kota pantai memiliki peranan penting sebagai pembentuk struktur ruang di wilayah kepulauan Indonesia. Sehingga perlu ditata secara harmonis dan bersinergis agar tidak menimbulkan konflik kepentingan, degradasi lingkungan, dan penggunaan sumberdaya secara tidak efisien dan efektif. <http://www.kp3k.kkp.go.id> (2014)

Sumberdaya wilayah pesisir dan laut merupakan modal yang sangat berharga dalam meningkatkan ekonomi nasional maupun daerah. Pelaksanaan otonomi daerah seperti yang

tertuang dalam UU No 32 Tahun 2004, telah memberi keleluasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangga dan memajukan kesejahteraan daerahnya atas dasar prakarsa, kreatifitas dan peran serta masyarakat. Sebagai implikasinya daerah dituntut untuk mampu mengidentifikasi potensi dan nilai ekonomi sumberdaya pesisir dan laut yang dimilikinya. Tersedianya data potensi dan nilai ekonomi sumberdaya pesisir dan laut yang akurat dan terbaharui akan mempermudah formulasi kebijakan pendayagunaan potensi sumberdaya daerah tersebut. Selain itu, daerah juga dituntut untuk mampu mengelola sumberdaya pesisir dan laut secara optimal dan bertanggung jawab sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Secara khusus dalam UU No. 32 tahun 2004 diatur kewenangan daerah di wilayah perairan laut yang meliputi (Pasal 10 ayat 2):

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan laut sebatas wilayah laut (sejauh 4 mil laut diukur dari garis pantai perairan laut laut)
- b. Pengaturan kepentingan administratif
- c. Pengaturan Tata Ruang
- d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang di keluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangan oleh pemerintah pusat
- e. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

Disamping potensi sumberdayanya, perlu juga disadari bahwa kawasan pesisir ini mempunyai potensi masalah diantaranya adalah degradasi lingkungan. Selama dua dekade terakhir lingkungan pesisir terdegradasi sebagai akibat dari rusaknya ekosistem. Tekanan terhadap lingkungan pesisir juga bersumber dari kegiatan pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai yang tidak berwawasan lingkungan. Kondisi seperti ini hampir merata dan terjadi di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Sebagai kota provinsi, Jayapura menjadi pusat kegiatan yakni kegiatan ekonomi, pendidikan dan sentral pemerintahan provinsi. Akibatnya segala aktivitas pembangunan dan pengelolaan lingkungan menjadi terpusat di kota ini, hingga di khawatirkan jika tidak ada konsep perencanaan yang matang maka akan terjadi kejenuhan dan ketimpangan pembangunan.

Disamping potensi sumberdayanya, perlu juga disadari bahwa kawasan pesisir ini mempunyai potensi masalah diantaranya adalah degradasi lingkungan. Selama dua dekade terakhir lingkungan pesisir terdegradasi sebagai akibat dari rusaknya ekosistem. Tekanan terhadap lingkungan pesisir juga bersumber dari kegiatan pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai yang tidak berwawasan lingkungan. Kondisi seperti ini hampir merata dan terjadi di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Kota Jayapura memiliki daya tarik tersendiri untuk pengembangan berbagai aktivitas. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecilnya telah menjadi sasaran aktivitas yang diikuti oleh berbagai kegiatan eksploitasi sumberdaya, perdagangan dan jasa. Dan yang tak kalah menariknya

adalah pemanfaatan sumberdaya alam pesisir dan laut yang terbuka bagi setiap orang yang memiliki akses dan kepentingan di dalamnya menjadi masalah tersendiri dalam pengelolaan wilayah. Pembangunan pesisir dan laut Kota Jayapura secara berkelanjutan harus memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat dan pemerintah sekaligus mempertahankan kualitas lingkungan dan sumberdaya di dalamnya. Secara ekonomi menguntungkan, tetap mempertahankan kondisi ekosistem (aspek konservasi), tidak bertentangan dengan kondisi

sosial ekonomi dan budaya masyarakat Portnumbay yang didukung oleh potensi sumberdaya yang ada, sehingga dibutuhkan suatu pola pengelolaan terpadu untuk menjawab dua permasalahan pokok, yakni : 1) kebutuhan untuk menjaga dan mempertahankan sumberdaya pesisir yang terancam over eksploitasi dengan memberdayakan peran pemimpin lokal (pimpinan adat) dalam pemanfaatan ruang Kota, 2) kebutuhan untuk mengelola pemanfaatan sumberdaya pesisir secara rasional dan mencapai keseimbangan antara pemanfaatan yang berkelanjutan dengan pengelolaan yang menintegrasikan Hukum Adat sebagai hukum positif. Pembangunan berorientasi konservasi yang direncanakan secara baik akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial untuk suatu masyarakat pesisir dalam jangka panjang. Konservasi sumberdaya dan kepentingan pembangunan ekonomi dapat dan harus dipadukan. Pembangunan yang merusak lingkungan pada akhirnya akan menyebabkan dampak negatif pada aspek sosial, ekonomi dan budaya. ICM dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang memungkinkan orientasi kebijakan dan pengembangan strategi pengelolaan untuk memberi perhatian terhadap masalah konflik pemanfaatan sumberdaya dan mengendalikan dampak yang disebabkan oleh intervensi manusia terhadap lingkungan. ICM menyajikan suatu kerangka kelembagaan dan hukum, dengan focus tentang perencanaan dan pengelolaan lingkungan dan mengkoordinasikan berbagai badan yang berkepentingan agar dapat bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Perencanaan dan pengelolaan secara sektoral masih diperlukan namun dilaksanakan dalam rangka umum ICM. Pemeliharaan habitat spesies, sumberdaya alam dan pengelolaan proses pembangunan merupakan bagian dari program ICM.

**Tambahkan kenapa hukum adat perlu dii terapkan di kota jayapura.....**

**Tujuan studi :**

Mengungkapkan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan sebagai suatu proses pembelajaran ICM di Kota Jayapura

**Metodologi**

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari hasil penelitian terdahulu dan telaah pustaka untuk mengungkapkan fakta. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (*Moleong, 2007:6*). Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian

yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Informasi yang dikumpulkan secara deskriptif g ditampilkan dalam bentuk persentase, grafik dan narasi yang mengungkapkan fakta yang diteliti

Lokasi penelitian studi kasus pesisir kota Jayapura (Gambar 1).

**Sumber: Profil Kota Jayapura (Bapeda Kota Jayapura), 2008.**

**Gambar 1. Kota Pesisir Jayapura**

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. eksisting pesisir Kota Jayapura (Gambaran umum Pesisir Kota Jayapura)**

**jelaskan kondisi sumberdaya dan budaya (hukum adat msy)**

### **2. Isu pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan (permasalahan)**

### **3. Solusi pengelolaan kawasan pesisir Kota Jayapura**

## **Kesimpulan dan saran**

### **Daftar pustaka.**

Bertitik tolak dari kondisi di atas, dan prospek pengembangan serta semangat desentralisasi dari otonomi daerah, maka prinsip dasar pembangunan Kota Jayapura adalah mewujudkan Kota Jayapura yang beriman, maju, mandiri dan sejahtera. Bila dikaitkan dengan potensi wilayah pesisirnya, maka Kota Jayapura merupakan bagian dari sentra pembangunan pesisir yang memadukan sisi daratan dan lautan sebagai komponen yang tak terpisahkan. Khusus untuk pengelolaan wilayah pesisir masih terbatas pada beberapa hal dan belum bisa menjadi modal dan sumber penghidupan utama bagi masyarakat. Sementara potensi sumberdaya pesisir yang dimiliki oleh daerah ini sangat besar. Jika sumberdaya pesisir dimanfaatkan secara optimal maka akan mendukung tercapainya Kota Jayapura yang maju, mandiri dan sejahtera. Untuk mendukung hal tersebut, hasil-hasil penelitian laut dan pesisir haruslah menjadi dasar bagi kebijakan dalam pembangunan Kota Jayapura.